

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis permasalahan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam dalam mengembangkan kemampuannya baik secara konseptual maupun skill dalam menunjang aktifitas yang akan dilaksanakan.
2. Kesehatan merupakan kondisi seseorang yang dinilai kurang sehat sehingga perlu dibekali dengan bantuan dana kesehatan terutama bagi masyarakat yang dianggap tidak mampu.
3. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat masyarakat yang pada tataran tertentu masyarakat dapat berusaha untuk bangkit dan mengalami sebuah perubahan pada tingkat kehidupan yang pada awalnya berada pada tataran kemiskinan dan berupaya untuk kedepan untuk hidup lebih baik.

5.2. Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut untuk diperhatikan:

1. Dibutuhkan adanya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat yang bterkategori miskin terutama pada Pendidikan agar mereka bisa terbantu dalam menyekolahkan anak-anaknya guna mendapatkan ilmu yang layak dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan bangsa.

2. Perlu ditingkatkan adanya bantuan dana kesehatan kepada masyarakat desa Lorotulus sehingga mereka dapat menggunakan untuk melakukan pengobatan secara teratur guna memperoleh kehidupan yang sehat dalam keluarga mereka.
3. Dibutuhkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah agar masyarakat merasa terbantu dalam rangka pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Lorotulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan pemerintahan yang layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Benazir and Azharsyah 2017.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Di Kabupaten Pidie Jaya”.pp.1-80.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : Grafindo Jaya
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kartasasmita, Ginandjar. (2006) *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Pustaka Cakra.
- Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Maleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*: Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*.
- Jurnal
- Hasyim Hasanah. 2016. *Teknik-Teknik Observasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang.Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016
- Hajar Hari Antoro. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal SII Ilmu Administrasi Negara 4: Pontianak*
- Kementerian Sosial. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.Kementerian Sosial RI:Jakarta

Nazara, Suahasil. 2007. *Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan program yang Realistis*. Dalam Warta Demografi tahun ke 37. No. 4 Tahun 2007. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.

Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa. Bina Mulia Hukum*: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Suharto, Edi. (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung, Refika Aditama.

Suryahadi, A., Suryadarma, D., dan Sumarto, S. 2006. *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components of Growth. Working Paper*. Jakarta:

Yohana Floridina Purba. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Medan

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).